

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Rabu Tanggal: 28 Februari 2018 Halaman: 13 REVISI PARAMETER KMS Dewan Minta Kaji Ulang JOGJA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta Pemerintah Kota Jogja meminta Pemerintah Kota Jogja mengkaji ulan perubahan parameter kelaurga sasaran jamianan perlindungan sosial atau pemegang kartu menuju sejahtera (KMS). Wakil rakyat beralasan perubahan parameter justru dinilah mengurangi kauta pemegang KMS. "Perubahan parameter itu pentin untuk menyesang KMS ata anggota keluarga yang sekolah SMA ke bawah, diubah menjadi saat ini, tapi pembobotannya untuk hal yang pokok kok dikurangi?" kata anggota Komisi D PPRD Kota salt ini, tap peinocootaninya untura, tap peinocootaninya untura Jala yang pokok kok dikurangii* kata anggota Komisi D DPRD Kota Jogia, Dwi Budi Utomo, dalam rapat bersama Dinas Sosial dii DPRD Kota Jogia, Selasa (27/2). Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Jogia, Bejo Suwarno memaparkan perubahan parameter keluarga sasaran perlindungan sosial untuk pendataan 2019. Dari tujuh parameter yang diubah di antaranya adalah soal pendapatan dan aset. Dalam parameter lama pendapatan keluarga miskin sebesar Rp300,000-Rp400,000, dinaikkan menjadi Rp423.815. Tagihan listrik per bulan yang awalnya kurang dari Rp50,000 menjadi Rp75,000. Namun bobot penilaiannya berkurang dari 12 poin menjadi 10 poin. lebih dari satu orang.
Sementara dari patameter sandang,
dari parameter lama, keluarga hanya
mampu membeli pakaian untuk
naggota keluarga makimal setuhun
sekali. Dalam parameter baru tidak
termasuk pakaian seragam. Adapun
parameter kesehatan, dari buang
air besar tidak di mandi cuci kakus
(MCK) menjadi tidak memiliki MCK.
Parameter papan, tempat tinggal
setiap anggota keluarga lima meter
persegi, menjadi delapan meter
persegi, Bejo mengatkan perubahan
parameter itu ditentukan oleh pihak
ketiga yang akan digunakan untuk
KMS 2019, yang pendataannya
dimulai pada Juni ini. Lebih Lengkap Halaman 14* Dewan Minta... Dwi Budi Utomo mengapresiasi upaya revisi parameter kemiskinan. Namun ia menekankan soal pendapatan, pangan, dan pendidikan bagian dari persoalan pokok kemiskinan yang perlu diutamakan dalam penilaian KMS, sehingga pembobotannya perlu dinalikkan, bukan malah turun. "Pesan kami revisi parameter ini perlu dikaji ulang," ujar Dwi Budi. Terkait dengan KMS yang belum masuk dalam BDT penerima bantuan Pemerintah Pusat, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan agar dimasukkan dalam kuota tambahan data penerima bantuan keluarap harapan (PKH) dari Dinas Sosial sebanyak 10.000 jiwa. Sementara sisanya menjadi pekerjaan rumah yang perlu dimasukkan jika ada kuota tambahan lagi. (Ujang Hasanudin) "Juni-Agustus mulai pendataan "Juni-Agustus mulai pendataan oleh pekerja sosial masyarakat untuk KMS 2019," kata Bejo. Namun, perubahan parameter itu juga masih akan disempurnakan kembali jika ada masukan-masukan. Juga masih adari mesenjuhmasikan.
Data warga penerima KMS tahun ini ditetapkan sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 18.651 KK atau 60.215 jiwa pemegang KMS.
Bejo mengatakan dari data KMS, yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Pusat sebanyak 33.432 jiwa. Sehingga masih ada sekitar 21.662 jiwa dari KMS yang tidak masuk.
"Kami upayakan dengan parameter baru ini, akan menyesuaikan dengan BDT karena BDT tidak ada skor penilaian," ujar Bejo.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005